

**RANCANGAN AKHIR RENJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025  
KECAMATAN BUMI MAKMUR**



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**KECAMATAN BUMI MAKMUR**

Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02 Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

---

**KEPUTUSAN CAMAT BUMI MAKMUR  
NOMOR : 900.1.11/21/SEKRT.BM/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR  
KECAMATAN BUMI MAKMUR  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

**CAMAT BUMI MAKMUR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 s/d 2026, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) dan menetapkan Rencana Kerja dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun

2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 106);

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyusun sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
2. Menghimpun data-data untuk penyusunan Penyusun Rencana Kerja (Renja);
3. Merumuskan capaian target indikator Rencana Kerja (Renja);
4. Melaksanakan tugas dengan kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab.
5. Mengumpulkan dan melaporkan hasil penyusunan Renja kepada Camat selaku penanggung jawab.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
Pada tanggal 10 Juli 2024

Camat Bumi Makmur  
Kabupaten Tanah Laut,



SAHIDANOR, S.Sos, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661106 198601 1 002

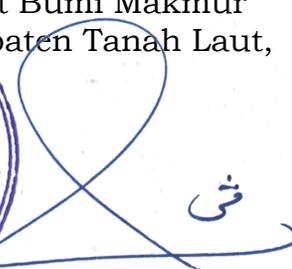
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT  
NOMOR : 900.1.11/21/SEKRT.BM/2024  
TANGGAL : 10 JULI 2024

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR  
KECAMATAN BUMI MAKMUR  
KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2025**

No	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Camat	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Camat	Ketua
3	Kasi Pelayanan	Anggota
4	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
5	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
6	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
7	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
8	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
9	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

Camat Bumi Makmur  
Kabupaten Tanah Laut,



  
SAHDANOR, S.Sos, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661106 198601 1 002

## KATA PENGANTAR

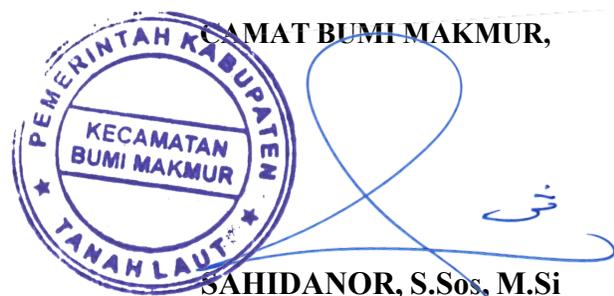
Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat hidayah dan karunianya sehingga Dokumen Rancangan Akhir Renja Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut dapat diselesaikan dengan baik.

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 ini dibuat dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2025 yang selanjutnya setelah melalui proses sesuai ketentuan, akan dituangkan dalam KUA/PPAS Tahun 2025 yang merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dimana RKA-SKPD setelah melalui pembahasan oleh TAPD akan di formulasikan ke dalam RAPBD TA 2025.

Dokumen Rancangan Akhir Renja Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 adalah dokumen yang berisikan program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya sampai dengan target capaian tahun berjalan 2023.

Semoga Rancangan Akhir Renja Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 ini dapat menjadi arah dan pedoman serta motivasi untuk peningkatan kinerja bagi aparatur pemerintahan di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut sebelum ditetapkannya RKPD tahun 2025 ini, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Bumi Makmur, 10 Juli 2024



**SAHIDANOR, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19661106 198601 1 002**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II.....	6
HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) SKPD KECAMATAN BUMI MAKMUR TAHUN LALU .....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Bumi Makmur .....	25
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	26
BAB III.....	28
TUJUAN DAN SASARAN SKPD KECAMATAN BUMI MAKMUR .....	28
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2025 Kecamatan Bumi Makmur .....	28
BAB IV .....	29
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	30
4.1 Program dan Kegiatan .....	30
BAB V.....	41
PENUTUP.....	41

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rancangan Akhir Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD guna mengoperasionalkan RKPD disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah sebelum dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut.

SKPD Kecamatan Bumi Makmur berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan diamanatkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
- s. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31)
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut

- 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
  - v. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);
  - w. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
  - x. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 27);
  - y. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 900.1.1.2/24/Bappeda/2025 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2025

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai acuan SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam mengoperasionalkan RKPDP SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025, yaitu :

- a. Sebagai acuan SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam mengoperasionalkan RKPDP SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut.
- b. Merumuskan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Bumi Makmur selama tahun 2025 sebelum ditetapkan melalui proses pembahasan oleh Tim RKPDP Kabupaten Tanah Laut.
- c. Untuk mengetahui tingkat pencapaian target dan sasaran setiap program dan kegiatan.
- d. Untuk mengetahui berapa anggaran/pagu yang diperlukan dalam membiayai setiap program dan kegiatan sebagai bahan untuk menyusun APBD Tahun 2025.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang ditulis adalah menguraikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD

Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 , yang terdiri dari:

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) SKPD KECAMATAN BUMI MAKMUR TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bumi Makmur
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Bumi Makmur
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD KECAMATAN BUMI MAKMUR**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD KECAMATAN BUMI MAKMUR**

- 4.1. Program dan Kegiatan

**BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) SKPD KECAMATAN BUMI MAKMUR**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur**

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bumi Makmur berjalan sebagaimana yang diharapkan, artinya tepat sasaran. Ini dapat dibuktikan dengan program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam pekerjaan yang telah menghasilkan beberapa produk dokumen perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi misalnya ketidakjelasan regulasi atau peraturan lainnya yang tidak relevan dengan kondisi pada saat ini

Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

1. Masalah – masalah yang dihadapi;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 Juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
2. Memperhatikan keberlanjutan pembangunan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Bumi Makmur Telah melaksanakan 6 (Enam) Program yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 3.600.644.659,- dengan capaian realisasi kinerja fisik sebesar **99,48%** dan serapan anggaran mencapai **85,99 %**. Adapun program yang berkaitan dengan renstra telah mencapai hasil yang tidak maksimal yaitu:

1. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
  - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - 1) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dengan capaian serapan anggaran sebesar 0 % dan capaian Fisik Sebesar 0 %

Adapun hasil evaluasi Rancangan Akhir Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun 2023 telah dilaksanakan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 85,99% dan realisasi fisik 99,48%. Berikut ini adalah hasil evaluasi Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023 dan capaian Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH LAUT

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Terlaksananya Belanja Pegawai berupa gaji pokok dan tambahan penghasilan, dengan pagu anggaran Rp. 3.032.963.421,- dan realisasinya sebesar Rp. 2.430.126.089,- dengan tingkat capaian target 80,16 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan pagu anggaran Rp. 1.292.500,00,- dan realisasinya sebesar Rp. 1.134.000,- dengan tingkat capaian target 87,74 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya belanja barang habis pakai, dengan pagu anggaran Rp. 2.360.698,- dan realisasinya sebesar Rp. 1.584.295,- dengan tingkat capaian target 67,11 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya belanja barang habis pakai, dengan pagu anggaran Rp. 79.596.799,- dan realisasinya sebesar Rp. 69.685.750,- dengan tingkat capaian target 87,52 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya belanja barang habis pakai, dengan pagu anggaran Rp. 3.489.006,- dan realisasinya sebesar Rp 2.443.500,- dengan tingkat capaian target 70,03 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya belanja barang habis pakai, dengan pagu anggaran Rp. 8.178.750,- dan realisasinya sebesar Rp. 5.580.000,- dengan tingkat capaian target 68,23 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
- 5) Penyediaan Bahan/Material

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya belanja barang habis pakai, dengan pagu anggaran Rp. 9.981.985,- dan realisasinya sebesar Rp. 8.891.000,- dengan tingkat capaian target 89,07 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan pagu anggaran Rp. 179.940.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 164.911.953,- dengan tingkat capaian target 91,65 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran Rp. 44.580.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 36.559.812,- dengan tingkat capaian target 82,01%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
  - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan pagu anggaran Rp. 171.024.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 170.130.054,- dengan tingkat capaian target 99,48%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan pagu anggaran Rp. 31.900.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 29.079.800,- dengan tingkat capaian target 91,16%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan pagu anggaran Rp. 36.630.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 27.972.651,- dengan tingkat capaian target 76,37%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 92,00% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

## 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- 1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan, dengan pagu anggaran Rp. 16.379.344,- dan realisasinya sebesar Rp. 11.836.500,- dengan tingkat capaian target 72,26%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

## 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, dengan pagu anggaran Rp. 11.535.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 8.745.000,- dengan tingkat capaian target 75,81%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah

ditetapkan yaitu terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan pagu anggaran Rp. 49.128.120,- dan realisasinya sebesar Rp. 39.351.360,- dengan tingkat capaian target 80,10%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan pagu anggaran Rp. 6.923.350,- dan realisasinya sebesar Rp. 6.760.000,- dengan tingkat capaian target 97,64%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pagu anggaran Rp. 99.973.800,- dan realisasinya sebesar Rp. 99.243.000,- dengan tingkat capaian target 99,22%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

2) Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional, dengan pagu anggaran

Rp. 1.128.691.673,- dan realisasinya sebesar Rp. 1.126.094.000,- dengan tingkat capaian target 99,77%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

- 3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  
Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan pagu anggaran Rp. 53.482.500,- dan realisasinya sebesar Rp. 39.948.490,- dengan tingkat capaian target 99,77%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

b. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan pagu anggaran Rp. 5.500.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 5.000.000,- dengan tingkat capaian target 90,91%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

2) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Kegiatan ini tidak berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, dengan pagu anggaran Rp. 10.997.320,- dan realisasinya sebesar Rp. 0,- dengan tingkat capaian target 0%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD 0% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

Tabel Evaluasi Tujuan, Sasaran, Program Tahun 2023

Tujuan/Sasaran/Program		Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Keterangan Tidak Tercapai
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah							
	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada kecamatan Bumi Makmur						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	Nilai	90	90,20	90,20	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100 %	100 %	80.16%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250 Laporan	250 Laporan	89.26%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100 %	100 %	95.87%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100 %	92 %	83.25%	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM	Nilai	90	90,20	90,20	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	%	100 %	100 %	72.26%	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IKM	Nilai	90	90,20	90,20	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	79.28%	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	IKM	Nilai	90	90,20	90,20	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	97.64%	

		PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	IKM	Nilai	90	90,20	90,20	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100 %	100 %	98.68%	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	IKM	Nilai	90	90,20	90,20	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.31%	

**TABEL T.C.29**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023**  
**KECAMATAN BUMI MAKMUR**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		<b>Semua Bidang</b>																							
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																							
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	3.032.963.421	25	347.444.038	50	992.517.564	75	540.765.484	100	550.533.003	100	2.431.260.089	100,00%	80,16%	100,00	2.431.260.089	0,00%	0,00%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	-	0,00	-	21	3.031.670.921	21	347.444.038	21	992.449.564	21	540.622.384	21	549.610.103	21	2.430.126.089	100,00%	80,16%	21,00	2.430.126.089	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	1.292.500	2	-	2	68.000	2	143.100	5	922.900	5	1.134.000	100,00%	87,74%	5,00	1.134.000	0,00%	0,00%
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	283.547.238	25	55.570.869	50	36.744.817	75	47.955.700	100	112.825.112	100	253.096.498	100,00%	89,26%	100,00	253.096.498	0,00%	0,00%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	5	2.360.698	-	-	-	-	-	-	5	1.584.295	5	1.584.295	100,00%	67,11%	5,00	1.584.295	0,00%	0,00%

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	10	79.596.799	8	-	8	7.192.550	8	23.800.700	10	38.692.500	10	69.685.750	100,00%	87,55%	10,00	69.685.750	0,00%	0,00%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	3.489.006	1	-	1	2.443.500	1	-	1	-	1	2.443.500	100,00%	70,03%	1,00	2.443.500	0,00%	0,00%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	8.178.750	2	-	2	-	2	2.080.000	2	3.500.000	2	5.580.000	100,00%	68,23%	2,00	5.580.000	0,00%	0,00%
		Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	9.981.985	-	-	-	-	-	-	3	8.891.000	3	8.891.000	100,00%	89,07%	3,00	8.891.000	0,00%	0,00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	179.940.000	3	55.570.869	6	27.108.767	9	22.075.000	12	60.157.317	12	164.911.953	100,00%	91,65%	12,00	164.911.953	0,00%	0,00%
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	215.604.000	25	31.879.298	50	70.620.172	75	51.935.545	100	52.254.851	100	206.689.866	100,00%	95,87%	100,00	206.689.866	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	44.580.000	3	4.473.613	6	12.960.827	9	9.403.032	12	9.722.340	12	36.559.812	100,00%	82,01%	12,00	36.559.812	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	171.024.000	3	27.405.685	6	57.659.345	9	42.532.513	12	42.532.511	12	170.130.054	100,00%	99,48%	12,00	170.130.054	0,00%	0,00%
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	0,00	-	0,00	-	100	68.530.000	25	2.964.134	50	21.770.250	75	12.815.967	92	19.502.100	92	57.052.451	92,00%	83,25%	92,00	57.052.451	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	31.900.000	1	2.000.000	1	15.670.000	1	5.900.000	1	5.509.800	1	29.079.800	100,00%	91,16%	1,00	29.079.800	0,00%	0,00%

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	12	36.630.000	11	964.134	11	6.100.250	11	6.915.967	11	13.992.300	11	27.972.651	91,67%	76,37%	11,00	27.972.651	0,00%	0,00%
																				<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	99,92%	81,88%			
																				<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Tinggi	Tinggi			
		<b>KECAMATAN</b>																							
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			-	-			16.379.344				4.500.000		5.286.500		2.050.000		11.836.500		72,26%		11.836.500		0,00%
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terfasilitasinya percepatan pencapaian standar pelayanan minimal pelayanan (%)	0,00	-	0,00	-	100	16.379.344	25	-	50	4.500.000	75	5.286.500	100	2.050.000	100	11.836.500	100,00%	72,26%	100,00	11.836.500	0,00%	0,00%
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	16.379.344	1	-	1	4.500.000	1	5.286.500	1	2.050.000	1	11.836.500	100,00%	72,26%	1,00	11.836.500	0,00%	0,00%
																				<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	100,00%	72,26%			
																				<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Tinggi	Sedang			
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			-	-			60.663.120				15.076.360		18.650.000		14.370.000		48.096.360		79,28%		48.096.360		0,00%
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa (%)	0,00	-	0,00	-	1	60.663.120	1	-	1	15.076.360	1	18.650.000	1	14.370.000	1	48.096.360	100,00%	79,28%	1,00	48.096.360	0,00%	0,00%
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	11	11.535.000	-	-	-	-	-	-	11	8.745.000	11	8.745.000	100,00%	75,81%	11,00	8.745.000	0,00%	0,00%

		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	6	49.128.120	-	-	6	15.076.360	6	18.650.000	6	5.625.000	6	39.351.360	100,00%	80,10%	6,00	39.351.360	0,00%	0,00%	
																				<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	100,00%	79,28%				
																					<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Tinggi	Tinggi			
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>							6.923.350	-	-						6.760.000		6.760.000		97,64%		6.760.000	0,00%		
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	0,00	-	0,00	-	1	6.923.350	1	-	1	-	1	-	1	6.760.000	1	6.760.000	100,00%	97,64%	1,00	6.760.000	0,00%	0,00%	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	6.923.350	1	-	1	-	1	-	1	6.760.000	1	6.760.000	100,00%	97,64%	1,00	6.760.000	0,00%	0,00%	
																					<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	100,00%	97,64%			
																					<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>							1.282.147.973		5.681.730		575.491.760		666.937.000		17.175.000		1.265.285.490			98,68%		1.265.285.490	0,00%	
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerinaha Umum (%)	0,00	-	0,00	-	100	1.282.147.973	-	5.681.730	-	575.491.760	100	666.937.000	-	17.175.000	-	1.265.285.490	0,00%	98,68%	0,00	1.265.285.490	0,00%	0,00%	

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0,00	-	0,00	-	250	99.973.800	-	-	-	250	99.243.000	-	-	250	99.243.000	100,00%	99,27%	250,00	99.243.000	0,00%	0,00%	
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0,00	-	0,00	-	2000	1.128.691.673	-	-	1.000	561.700.000	2.000	564.394.000	2.000	-	2.000	1.126.094.000	100,00%	99,77%	2000,00	1.126.094.000	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	53.482.500	1	5.681.730	1	13.791.760	1	3.300.000	1	17.175.000	1	39.948.490	100,00%	74,69%	1,00	39.948.490	0,00%	0,00%
																			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	100,00%	98,68%				
																				<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>							16.497.320				2.000.000		2.000.000		1.000.000		5.000.000		30,31%		5.000.000		0,00%
		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	0,00	-	0,00	-	100	16.497.320	-	-	25	2.000.000	50	2.000.000	50	1.000.000	50	5.000.000	50,00%	30,31%	50,00	5.000.000	0,00%	0,00%

		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	11	5.500.000	-	-	4	2.000.000	8	2.000.000	11	1.000.000	11	5.000.000	100,00%	90,91%	11,00	5.000.000	0,00%	0,00%				
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	10.997.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
										<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>										33,34%	30,31%								
										<b>Predikat Kinerja</b>										Sangat Rendah	Sangat Rendah								
									4.983.255.766	<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>										<b>99,72%</b>	<b>85,99%</b>								
										<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>										<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>								

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 masih bersifat umum belum ada standar baku mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Mengingat tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Bumi Makmur yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, maka dalam pelaksanaan program/kegiatan SKPD Kecamatan Bumi Makmur tidak lepas dari Program/Kegiatan yang mendukung visi dan misi Kabupaten Tanah Laut.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bumi Makmur yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Tanah Laut serta rencana strategis SKPD Kecamatan Bumi Makmur, maka dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan lingkup SKPD yang ada di wilayah Kecamatan Bumi Makmur dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan bagi kepentingan perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Bumi Makmur.

Kecamatan Bumi Makmur dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Standar Pelayanan yang merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi layanan dan atau penerima layanan. Adapun jenis produk dan layanan yang ada pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur dan telah dilaksanakan selama ini antara lain:

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Pelayanan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bumi Makmur, salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah melakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dimana hasil dari pelaksanaan SKM ini adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023 yakni nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana Kecamatan Bumi Makmur pada Tahun 2023 memperoleh IKM sebesar **90,20** dengan mutu pelayanan berkategori **Sangat Baik**.

Adapun jenis pelayanan pada kantor kecamatan Bumi Makmur yang dilaksanakan selama tahun 2023 sebagai berikut :

### A. Pelayanan Non Perizinan

1. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Kartu Keluarga
2. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KTP
3. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KIA
4. Pelayanan fasilitasi pangajuan Surat Keterangan Pindah
5. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kelahiran
6. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kematian
7. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
8. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kematian dari Desa
9. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

10. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
  11. Pelayanan Pengajuan Subsidi Listrik PLN
  12. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Usaha
  13. Pelayanan Legalisasi Pengajuan Proposal (Masjid, Mushola, Majelis, Kelompok Keagamaan, Yayasan, Pendidikan, Karang Taruna, Kelompok Tani dsb)
  14. Pelayanan Legalisasi Surat-Surat (Keterangan lain-lain)
- B. Pelayanan Perizinan
1. Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Dispensasi Nikah
  2. Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil

Kecamatan Bumi Makmur telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di kantor Kecamatan Bumi Makmur. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP sebanyak 14 jenis pelayanan non perizinan dan 2 pelayanan perizinan telah memenuhi target indikator tahun 2023 dengan capaian target 100%. Volume / Jumlah Pelayanan administrasi, pelayanan administrasi kependudukan dan legalisasi surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan realisasi pelayanan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Jumlah pelayanan	Keterangan
1	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Kartu Keluarga	515	Seksi Pelayanan
2	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KTP	416	Seksi Pelayanan
3	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KIA	174	Seksi Pelayanan
4	Pelayanan fasilitasi pangajuan Surat Keterangan Pindah	60	Seksi Pelayanan
5	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kelahiran	214	Seksi Pelayanan
6	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kematian	43	Seksi Pelayanan
7	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	191	Seksi Kemasyarakatan
8	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kematian dari Desa	5	Seksi Pelayanan
9	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	28	Seksi Pelayanan
10	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	14	Seksi Trantib
11	Pengajuan Subsidi Listrik PLN	-	Seksi Kemasyarakatan
12	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Usaha	17	Seksi Pelayanan
13	Pelayanan Legalisasi Pengajuan Proposal	47	Seksi

	(Masjid, Mushola, Majelis, Kelompok Keagamaan, Yayasan, Pendidikan, Karang Taruna, Kelompok Tani dsb)		Kemasyarakatan
14	Pelayanan Legalisasi Surat-Surat (Keterangan lain-lain)	3	Seksi Pelayanan
15	Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Dispensasi Nikah	24	Seksi Kemasyarakatan
16	Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil	-	Seksi Pelayanan



*Gambar Grafik Data Pelayanan Tahun 2023*

Berdasarkan pada Tabel dan Gambar diatas, Pelayanan Kepengurusan Kartu Keluarga mempunyai capaian paling banyak yaitu 515 berkas, Pengajuan Subsidi Listrik PLN dan Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil tidak ada sama sekali.

Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan, berupa 535 lembar kuesioner yang telah diisi oleh masyarakat, sehingga didapat nilai untuk IKM Tahun 2023 adalah **90,20** dan termasuk kategori Sangat Baik serta berada dalam mutu pelayanan **A**. Dan untuk sejak tahun 2017 hingga tahun 2023, Kecamatan Bumi Makmur sudah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dengan didukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Seksi dan Sub Bagian yang ada di SKPD Kecamatan Bumi Makmur.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja yang digunakan adalah data kinerja tahun 2022 dan 2023, berapa capaian yang telah

teralisasi sehingga untuk tahun yang akan datang dapat diprediksi target dan capaiannya.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Bumi Makmur**

Sejauh ini, tingkat kinerja pelayanan di SKPD Kecamatan Bumi Makmur cukup berjalan dengan lancar, mengingat kuantitas PNS di Kecamatan Bumi Makmur yang cukup memadai terdiri atas 18 (Delapan Belas) orang dan 7 ( Tujuh ) orang pegawai tenaga kontrak. Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap kualitas kerja PNS yang lain yang secara individu sudah memegang jabatan dan pekerjaannya sesuai tupoksi masing-masing.

Daripada itu kecamatan bumi makmur juga masih membutuhkan tenaga PNS khusus untuk bidang analisis dan pengelola pada masing-masing bidang, sarana dan prasarana yang dimiliki walaupun sejauh ini sudah cukup optimal akan tetapi kondisi usia dan fisik sarana dan prasarana tersebut sudah tidak layak untuk digunakan. Harapannya pada tahun 2025, sarana dan prasarana yang sudah tidak layak tersebut dapat diperbarui ataupun ditambah agar semakin meningkatkan kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Bumi Makmur kepada masyarakat.

Ada beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Bumi Makmur yakni sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat dan tentunya berdasarkan prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Harapannya dengan adanya pelayan publik berupa pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
2. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur karena keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka aparatur yang ada harus mencukupi/ideal dalam jumlah dan memiliki persyaratan kuantitas. Oleh karena itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan kompetensi sumber daya aparatur dan penambahan aparatur.
3. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dengan harapan agar peran serta masyarakat untuk terlibat dalam setiap pembangunan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Ada beberapa hal yang menjadi peluang dan tantangan yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Bumi Makmur ke depan adalah :

1. Sumber Daya Manusia Aparatur
  - a. Kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
  - b. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
  - c. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan aparatur yang sesuai dengan latar belakang pendidikan
2. Sarana dan Prasarana
  - a. Mengembangkan Teknologi Informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam upaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
  - b. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
  - c. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
  - d. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja.
  - e. Peningkatan sarana dan fasilitas yang memudahkan masyarakat selama berurusan dan memperhatikan hak penyandang disabilitas, sehingga meningkatkan nilai tambah SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Penambahan Wewenang yang Dilimpahkan

Secara umum, rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2025 adalah peningkatan kompetensi dan kuantitas Sumber Daya Manusia SKPD Kecamatan Bumi Makmur, peningkatan sarana dan prasarana, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, serta sosial keagamaan.

#### **2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelaahan dilakukan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 – 2026, yang berisi perencanaan program/kegiatan selama 3 (Tiga) tahun, direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan perlu proses, dan dilakukan dengan meminta masukan dari Camat, Sekretaris Camat, para Kepala Seksi, para Kasubbag dan staf dengan mengedepankan keperluan dan skala prioritas, baik keperluan administrasi kantor, aparat kecamatan, aparat desa maupun kebutuhan masyarakat yang mendesak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja pada tahun 2025 terdapat kegiatan yang menitik beratkan pada kegiatan Kesektarian, kemasyarakatan, keagamaan, bantuan sosial. Secara umum, hasil analisis kebutuhan pelaksanaan tupoksi SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 sudah sesuai dengan Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 – 2026, namun ada beberapa Program dan Kegiatan yang dimuat

dalam rumusan Rancangan Akhir Renja 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan ada juga beberapa kegiatan yang dibuat dalam Rancangan Awal Renja 2025 tetapi nilai pagunya dinaikan dari nilai Rancangan Akhir RKPD dikarenakan melihat kondisi persentase yang dicapai pada tahun sebelumnya telah berjalan dengan baik.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN SKPD KECAMATAN BUMI MAKMUR**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Renja, tidak terlepas dari Kebijakan Nasional. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung dari sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang diambil antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bumi Makmur terkait langsung dengan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Disamping itu hasil- hasil pembangunan harus dapat meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2025 Kecamatan Bumi Makmur**

Tujuan Rencana Kerja merupakan Penjabaran Target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (RENSTRA), yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu 3 ( Tiga ) Tahun kedepan dari tahun 2024 sampai dengan 2026.

Untuk mewujudkan Target Kabupaten Tanah Laut di atas, Kecamatan Bumi Makmur menetapkan Tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 ( Tiga ) Tahun kedepan yakni :

1. Meningkatnya kualitas pembangunan desa.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Bumi Makmur adalah :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik
2. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur.

Tabel TC-25  
Tujuan dan Sasaran  
Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut  
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan /Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-			
				Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024	2025	2026	
1	<b>Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah</b>		<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	4,53/A	4,53/A	4,54/A	4,55/A	4,57/A	
			Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	-	-	0,45	0,9	1	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	Persentase BUMDes yang Operasionalnya Berjalan Baik	-	-	100	100	100
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89,86	92,40	90,00	90,00	90,00
2	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>		<b>Nilai SAKIP KABUPATEN</b>	<b>67,28</b>	<b>69,00</b>	<b>70,01</b>	<b>75</b>	<b>80,01</b>	
			Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur	Nilai AKIP Kecamatan Bumi Makmur	53,20	72	75,00	76,00	77,00

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 SKPD Kecamatan Bumi Makmur terdapat 5 (Lima) program dan 10 (Sepuluh) kegiatan serta 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan yang telah direncanakan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan terfokus di Kecamatan Bumi Makmur dengan menitik beratkan kepada masyarakat sebagai objek utama.

Adapun rencana program dan kegiatan untuk Tahun 2025 yang nantinya akan dilaksanakan SKPD Kecamatan Bumi Makmur untuk lebih jelasnya seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini.

No	PROGRAM / KEGIATAN	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	
	a	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	
	a	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
	b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	
	a	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
	b	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
	c	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	
	a	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
	b	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
	a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	e	Penyediaan Bahan/Material
	f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
	a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BUMI MAKMUR TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026  
KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR KAB. TANAH LAUT**

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Kantor Kecamatan Bumi Makmur					4.607.027.850									0,00	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN					4.607.027.850									0,00	
	7	01			KECAMATAN					4.607.027.850									0,00	
1	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat Kecamatan Bumi Makmur	100 Nilai			100 Nilai	3.492.176.361							100 Nilai	0,00	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	5.999.341			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur	-	0,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	3.999.735	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1.999.606	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 Persen	2.834.633.135			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur	-	0,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2.834.633.135	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	22.089.000			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur	-	0,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				22 Paket	22.089.000	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	280.345.090			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.986.460	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	47.496.438	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	4.991.018	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7.999.885	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	14.971.289	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	199.900.000	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 Persen	29.220.495			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	29.220.495	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	214.289.300			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur	-	0,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	84.500.000	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	129.789.300	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	105.600.000			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur	-	0,00	

	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	37.500.000	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	53.000.000	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	15.100.000	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Bumi Makmur	92,50 Nilai		92,50 Nilai	5.999.907						92,50 Nilai	0,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-		100 %	5.999.907			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut	-	0,00	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan													

						Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5.999.907	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR	
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IKM Kecamatan Bumi Makmur	92,50 Nilai		92,50 Nilai	69.946.750							92,50 Nilai	0,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-		100 %	69.946.750			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut	-	0,00		
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				11 Dokumen	9.990.000	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	59.956.750	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR	

4	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	IKM Kecamatan Bumi Makmur	92,50 Nilai			92,50 Nilai	1.019.945.810					92,50 Nilai	0,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			100 Persen	1.019.945.810			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut	-	0,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				20 Orang	99.990.539	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				600 Orang	874.995.871	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				8 Dokumen	44.959.400	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR		
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	IKM Kecamatan Bumi Makmur	92,50 Nilai		92,50 Nilai	18.959.022							92,50 Nilai	0,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi  Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-		100 Persen	18.959.022			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut	-	0,00			
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa															
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	7.992.000	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR		
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa															
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	10.967.022	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR		
<b>J U M L A H</b>											<b>4.607.027.850</b>									<b>0,00</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun 2025 selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 nantinya sebelum dilakukan proses penetapan pagu anggaran tahun 2025 terlebih akan menjalani proses pembahasan anggaran yang akan difasilitasi oleh Bappeda, BPKAD, DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk ditetapkan menjadi KUA/PPAS dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang diawali semua dengan melalui review oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Tugas dan fungsi Kecamatan Bumi Makmur berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara optimal melalui pembinaan dan disiplin kerja seluruh aparatur serta diharapkan memberikan pelayanan yang terbaik secara optimal kepada masyarakat.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bumi Makmur tahun 2025 sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran aparatur pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur. Rancangan Akhir Renja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf SKPD Kecamatan Bumi Makmur sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Strategi yang ditempuh untuk ke depannya dalam meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Bumi Makmur, antara lain:

1. Melakukan perbaikan dalam bidang perencanaan dan melakukan pengembangan perencanaan untuk masa yang akan datang;
2. Menggali, mengembangkan dan mengendalikan sumber-sumber informasi yang akan dijadikan bahan/data untuk penyusunan perencanaan SKPD;
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia baik dalam teknis perencanaan untuk mendukung dalam perencanaan anggaran yang efektif agar lebih meningkatkan kinerja SKPD.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 ini dibuat agar dapat menjadi arah dan pedoman serta motivasi untuk meningkatkan kinerja bagi seluruh aparatur pemerintah pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Bumi Makmur, 10 Juli 2024

